
PEMTEKDIKMAS

ISSN: XXXX-XXXX

(Pengabdian Ekonomi Multidisiplin Teknologi Pendidikan
Untuk Masyarakat)

Vol. 1 | No.2

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENJUALAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERUS JAYA PARAGE

Maksudi¹⁾, Rudiyanto²⁾, Hanifah³⁾, Sri Intan Purnama⁴⁾, Nurhaini⁵⁾

¹⁻⁵⁾STIE La Tansa Mashiro

Article Info

Keywords:

Management Accounting

Abstract

Mini fuel station or Pom Mini (short for pompa bensin mini) is a retail fuel sales business that no longer uses jerry cans or bottles, but uses a manual pump with a measuring cup or even a dispenser like a gas station. Mini gas stations have been around since 2012 and began to appear around 2014. This kiosk is an alternative place to refuel, especially for two-wheeled vehicles that run out of fuel while the location of the gas station is still far away. In addition to selling Premium gasoline, some mini gas station kiosks have also started selling Pertamina. La Tansa Mashiro's Community Service or Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) was carried out as an effort to develop and empower these BUMDES Terus Jaya Parage which are located in the Lebak regency - Banten, and one of them is BUMDES Terus Jaya Parage which is located in Parage Village and has been established since December 17, 2015 for about 5 years. During the Community Service or Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) activities taking place at BUMDES Terus Jaya Parage, the author found several weaknesses in BUMDES Terus Jaya Parage, namely the absence of a sales budget recording, and a lack of understanding of the importance of recording a sales budget in a business partner. From these weaknesses the author makes several activities to develop the BUMDES Terus Jaya Parage business, including making sales budget records and providing an understanding of the preparation of a good sales budget according to PSAK (Statement of Financial Accounting Standards).

Corresponding Author:

maksudi@gmail.com

Stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom Mini (singkatan dari pompa bensin mini) adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. SPBU Mini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios Pom Mini juga mulai menjual jenis Pertamax. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) La Tansa Mashiro dilakukan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan BUMDES Terus Jaya Parage ini yang terletak di daerah Kab. Lebak-Banten, dan salah satunya adalah BUMDES Terus Jaya Parage ini terletak di Desa Parage dan sudah berdiri sejak 17 Desember 2015 sekitar 5 tahun. Selama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berlangsung di BUMDES Terus Jaya Parage ini penulis menemukan beberapa kelemahan pada BUMDES Terus Jaya Parage ini, yaitu belum adanya pencatatan anggaran penjualan, dan kurang adanya pemahaman tentang pentingnya pencatatan anggaran penjualan dalam sebuah mitra usaha. Dari kelemahan tersebut penulis membuat beberapa kegiatan untuk mengembangkan usaha BUMDES Terus Jaya Parage ini, diantaranya seperti membuat catatan anggaran penjualan dan memberikan pemahaman mengenai penyusunan anggaran penjualan yang baik menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

©2020 PEMTEKDIKMAS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Implementasi ekonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

System pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti

bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pendapatan dana Desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Kenyataannya kendala umum yang disarankan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Berdasarkan aturan, 20 persen dana desa diperuntukkan untuk pendirian dan pengembangan dana BUMDES, mengingat dana desa sebagai instrumen penguatan otonomi daerah, serta mendorong prakarsa masyarakat desa mengembangkan masyarakat sesuai potensi masing-masing.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDES juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Potensi yang dimiliki BUMDES sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Agar dalam pelaksanaannya anggaran yang telah disusun dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka pihak BUMDes harus melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan anggarannya. Perencanaan dan pengawasan saling berkaitan, tujuan perencanaan tidak akan tercapai tanpa pengawasan, sebaliknya pengawasan tanpa didahului perencanaan tidak akan berhasil.

Salah satu cara BUMDes untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar adalah apabila BUMDes berhasil menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok. Oleh karena itu, BUMDes perlu melakukan perencanaan penjualan dengan membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan disusun paling awal dari anggaran-anggaran lainnya yang akan dibuat oleh BUMDes.

Penyusunan anggaran penjualan harus sesuai dengan tujuan BUMDes dan strategi BUMDes. Salah satu tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk menghasilkan laba dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan anggaran penjualan oleh pihak internal BUMDes. Anggaran penjualan merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu rencana penjualan.

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Terus Jaya Parage yang didirikan pada tahun 2016 sebagai penguatan ekonomi desa di kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Desa Parage dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang usaha Pom Mini.

Pom Mini di Desa Parage yang dimanfaatkan warga sebagai sarana menunjang berbagai kegiatan, mulai dari perseorangan hingga kegiatan yang dilakukan oleh desa sendiri. Namun sayangnya dengan fasilitas yang ada warga masih belum bisa memanfaatkan dengan baik karena minimnya pengetahuan warga mengenai peranan BUMDes ini di masyarakat setempat sehingga keuntungan yang didapat pun belum mampu menutupi seluruh modal yang telah dikeluarkan oleh BUMDes.

Selain itu BUMDes Terus Jaya Parage terkendala dalam proses pencatatan anggaran penjualan, dimana pihak pengelola BUMDes tidak melakukan pencatatan secara maksimal dimulai

dari awal pendirian Pom Mini hingga proses penjualan mulai dilakukan. Sehingga pihak pengelola masih kesulitan dalam melakukan pengelolaan dana selama proses berlangsung.

Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dana dalam menyusun anggaran penjualan BUMDes yang digunakan untuk memulai pendirian BUMDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana dalam menyusun anggaran penjualan BUMDes ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu “Pendampingan Penyusunan Anggaran Penjualan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terus Jaya Parage di Desa Parage Kecamatan Cikulur”

PROSES PENDAMPINGAN

Selama penulis melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada BUMDes Terus Jaya Parage, penulis menemukan masalah-masalah yang terjadi pada BUMDes Terus Jaya Parage khususnya dalam penyusunan anggaran penjualan. Adapun permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. BUMDes Terus Jaya Parage belum menerapkan sistem penyusunan anggaran penjualan yang berdasarkan PSAK.
2. Ketua BUMDes tidak memiliki anggaran penjualan untuk periode bulan selanjutnya.

Bagi semua perusahaan perencanaan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk perusahaan. Begitupula dalam sebuah BUMDes sangat diperlukan suatu cara dalam melakukan pengelolaan dana, agar sebuah pengelolaan dana berjalan lancar dalam sebuah usaha. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada BUMDes Terus Jaya Parage, maka penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Penulis membantu BUMDes dalam melakukan proses pengelolaan dana dan memberikan sedikit pemahaman mengenai kegunaan dan tujuan tata cara pengelolaan dana yang baik dan arti pentingnya bagi pihak BUMDes.
2. Adanya anggaran penjualan untuk bulan berikutnya memudahkan ketua BUMDes dalam memenuhi target penjualan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil yang Dicapai Selama Pendampingan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada BUMDes Terus Jaya ini merupakan kegiatan praktik akademik yang dilakukan oleh mahasiswa sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Dalam pendampingan kali ini penulis berkesempatan untuk membantu BUMDes Terus Jaya “POM MINI” di desa Parage dalam pengelolaan dana untuk periode tahun sebelumnya dan sebagai tolak ukur untuk periode bulan selanjutnya.

2. Anggaran Penjualan

Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Untuk menyusun anggaran penjualan periode selanjutnya penulis melakukan wawancara atas data periode penjualan periode selanjutnya penulis melakukan wawancara atas data periode bulan sebelumnya dan target penjualan yang diinginkan oleh BUMDes Terus Jaya pada bulan berikutnya. Berikut target penjualan yang diinginkan BUMDes Terus Jaya pada periode berikutnya.

Tabel 1
Target Penjualan yang diinginkan BUMDes Terus Jaya
Per 31 Juni-Agustus 2020

Wilayah	Target penjualan	Target penjualan perwilayah
Parage	50%	50%

Dalam pendampingan ini mitra pendampingan membuat target penjualan yaitu 50%.

Di bawah ini disajikan format anggaran penjualan yang dapat digunakan oleh perusahaan.

Tabel 2
Format Anggaran Penjualan
Per 31 Juni-Agustus 2020

PT..... Anggaran penjualan untuk bulan yang berakhir pada.....			
	Produk A	Produk B	Total
Penjualan brg jd dlm unit			
Dikalikan : harga jual			
Penjualan brg jadi			

Keterangan:

- Penjualan barang jadi dalam unit adalah perkiraan penjualan barang jadi (dalam unit) perusahaan untuk periode anggaran mendatang.
- Harga jual adalah harga jual yang akan dikeluarkan untuk setiap barang jadi yang akan dijual dalam periode anggaran mendatang.
- Penjualan barang jadi (dalam rupiah) diperoleh dengan mengalikan penjualan barang jadi (dalam unit) dengan harga jual barang jadi per unit.

Dari data penjualan sebelumnya perusahaan memiliki perkiraan target anggaran penjualan sebagai berikut:

Tabel 3
Perkiraan Unit Terjual dan Harga Jualnya

Keterangan	Pertalite
Penjualan (dalam liter)	2070 Liter
Harga jual perliter	Rp. 9.000,-

Dalam tabel tersebut mitra pendampingan membuat perkiraan unit terjual berikut harga jualnya.

Tabel 4
Anggaran Penjualan Bulan September

Keterangan	Pertalite
Penjualan (dalam liter)	2070 Liter
Harga jual perliter	Rp. 9.000,-
Penjualan	Rp. 18.630.000,-

Dalam pendampingan ini penulis mendampingi mitra untuk membuat tabel anggaran penjualan bulan September. Perhitungan dalam tabel tersebut yaitu penjualan (dalam liter) dikali dengan harga jual perliter.

Tabel 5
Anggaran Penjualan Perwilayah

Jenis produk	Volume penjualan perwilayah		Volume Total	Harga Perunit	Jumlah Anggaran
	Parage 50%	Parage 50%			
Pertalite	1035	1035	2070 Liter	Rp. 9.0000	Rp. 18.630.000
TOTAL	1035	1035			Rp. 18.630.000

Penulis mendampingi mitra pendampingan untuk menyusun anggaran penjualan perwilayah pemasaran di BUMDes “Terus Jaya”. Untuk menyusun anggaran tersebut penulis menjelaskan kepada mitra pendampingan dengan cara volume penjualan total dalam satu bulan Oktober dikalikan dengan target penjualan perwilayah pemasaran berdasarkan jenis produknya.

3. Manfaat Pendampingan

1. Memberikan informasi kepada pihak BUMDesa mengenai perhitungan anggaran penjualan yang dapat dijadikan acuan untuk periode selanjutnya.
2. Mengetahui jumlah anggaran penjualan yang didapat.
3. Penulis mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana suatu usaha dijalankan dari mitra pendampingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Terus Jaya belum mengetahui pentingnya pencatatan keuangan terlebih lagi pada lingkup anggaran penjualan. Dan penulis menyimpulkan bahwa:

1. Buku catatan penjualan sederhana yang diharapkan dapat berguna bagi BUMDes Terus Jaya dalam mengelola dan mengatur penjualan baik setiap bulan ataupun setiap harinya.
2. Pengelolaan anggaran penjualan dapat membantu perusahaan dalam mengelola penjualan, dan dapat memenuhi target penjualan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Akuntansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2020. *Panduan Pelaksanaan dan Pedoman Penyusunan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) STIE La Tansa Mashiri*, Banten.
- Sasongko, Catur dan Safrida Rumondong Parulian. 2010. *Anggaran*. Salemba Empat. Jakarta.
- Haruman, Tendi dan Sri Rahayu, 2007. *Penyusunan Anggaran Penjualan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ellen, Cristina. 2011. *Anggaran Perusahaan*, edisi kedua. Yogyakarta. BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. 2010. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar. 2010. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta. BPFE.
- Munandar. 2013. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta. BPFE.
- Gitusudarmo, Indriyo dalam Kurniawati. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE.